



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah.
- KEDUA : Target kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;
 3. Mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETIGA** : Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Pelaporan target kinerja dilakukan pada setiap bulan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman kinerja.kemenkumham.go.id;
 2. Unit Utama dan Kantor Wilayah melakukan evaluasi mandiri terhadap capaian target kinerja di setiap triwulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dimaksud kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan;
 3. Unit Utama melakukan verifikasi laporan target kinerja Kantor Wilayah melalui aplikasi sebagaimana tersebut pada angka 1, tanggal 6 sampai dengan 15 di setiap bulan setelah triwulan berakhir;
 4. Evaluasi capaian target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester melalui Rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA** : Capaian pelaporan target kinerja ditentukan oleh kepatuhan, pelaksanaan, dan pemenuhan data dukung yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:
1. **Warna merah** dengan kriteria belum melakukan *upload* data dukung dan data dukung tidak sesuai target capaian;
 2. **Warna kuning** dengan kriteria data dukung belum memenuhi target capaian;
 3. **Warna hijau** dengan kriteria data dukung telah memenuhi target capaian.
- KEENAM** : Penilaian berdasarkan kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA sebagai berikut:
1. Warna merah dengan nilai 0 sampai dengan 50;
 2. Warna kuning dengan nilai 51 sampai dengan 69;
 3. Warna hijau dengan nilai 70 sampai dengan 100.
- KETUJUH** : Untuk melakukan monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Pembina Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEDELAPAN** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:
1. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah tidak melaksanakan Target Kinerja;
 2. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah telah melaksanakan Target Kinerja tetapi tidak memenuhi capaian kinerja.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

**TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023**

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
DIVISI ADMINISTRASI						
1	Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah	Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022	Seluruh satker di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP secara utuh meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	<p>B01 : Menyiapkan Dokumen Perencanaan di lingkungan Kanwil</p> <p>B02-B12 Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kativ dan Ka UPT .</p> <p>B06: Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja semester I</p> <p>B12: 1.Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja semester II 2. Evaluasi Kinerja Mandiri</p>	<p>B01: 1. Renstra Kantor Wilayah dan UPT 2. Renja/RKKL Kanwil dan UPT 3. Dokumen PK secara berjenjang dari kanwil sampai dengan UPT</p> <p>B02-B12 Laporan e-perfomance [screenshot]</p> <p>B06: Dokumen Lkkip semester I</p> <p>B12 : Dokumen Lkkip semester II</p>	DIV ADMIN

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	1.Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP	Nilai maturitas SPIP Kantor Wilayah dan satuan kerja pada level 3 (terdefinisi)	B01: Koordinasi dengan APIP Kumham B02 Pelaksanaan Workshop (Bimtek) B03: 1. Pembentukan TIM Penilaian SPIP Kanwil 2. Melakukan Sosialisasi /Pendampingan penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	B01: Laporan Koordinasi B02: Laporan pelaksanaan workshop (Bimtek) B03: 1. SK TIM Penilaian SPIP Kanwil dan 2. Laporan Sosialisasi /Pendampingan penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	DIV ADMIN
				B06 : Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja	B06 : Laporan Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja	
				B09: Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja	B09: Laporan Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP Satuan kerja	
				B12: Analisis dan evaluasi hasil penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	B12: Laporan analisis dan evaluasi hasil penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	
		2. Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Seluruh satuan kerja melakukan Mitigasi Risiko	B03: Persiapan pendampingan MR di lingkungan Kanwil: 1. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. Pelaksanaan Workshop Penerapan MR	B03: : 1. Laporan Hasil Koordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. Laporan hasil Pelaksanaan Workshop Penerapan MR	DIV ADMIN
				B06-B09: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B06-B09: Laporan Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
				B12: Evaluasi Penerapan MR	B12: Evaluasi Penerapan MR	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
3	Seluruh revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja harus mendapat clearance dari Kepala Kantor Wilayah melalui divisi administrasi	Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi	Setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui kantor wilayah	B03 1. Membuat SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT Apabila melakukan usulan revisi anggaran belanja modal harus melalui persetujuan Kantor Wilayah 2. Satuan kerja melakukan analisis usulan revisi belanja modal sebelum diusulkan ke kanwil	B03 1. SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT Apabila melakukan usulan anggaran harus melalui persetujuan Kantor Wilayah 2. Laporan Analisis usulan revisi belanja modal Satuan kerja	DIV ADMIN
				B06 1. Kantor Wilayah melakukan analisis terhadap revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar sesuai dengan value for money 2. Membuat berita acara clearance atas usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar akuntabel dan efektif efisien 3. Kantor Wilayah mengusulkan seluruh revisi anggaran belanja modal kanwil beserta satuan kerjanya kepada sekretariat jenderal cq Biro Perencanaan dan Biro Keuangan	B06 1. Laporan analisis terhadap usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar sesuai dengan value for money 2. Membuat berita acara clearance atas usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar akuntabel dan efektif efisien 3. Laporan usulan seluruh revisi usulan anggaran belanja modal kanwil beserta satuan kerjanya kepada sekretariat jenderal cq Biro Perencanaan dan Biro Keuangan	
4	Peningkatan jumlah aset berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN dan Memiliki Sertifikat	Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN	1.Meningkatnya jumlah aset tanah & bangunan yg tercatat dlm SIMAK BMN sebanyak 70% 2. Bertambahnya sertifikat tanah dan	B03 : Identifikasi, inventarisasi atas aset berupa tanah dan bangunan	B03 : Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi asset	DIV ADMIN
				B06 Koordinasi dengan pihak terkait untuk pengusulan sertifikasi tanah	B06 : Laporan hasil koordinasi terkait pengusulan sertifikat tanah	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			bangunan yang merupakan BMN di lingkungan Kanwil sebesar 70%	B09 : Monitoring dan Evaluasi	B09 : Laporan monitoring dan evaluasi	
				B12 : Laporan Perubahan status aset pada SIMAK BMN	B12 : Laporan Perubahan status aset BMN	
5	Inventarisasi Kebutuhan Revitalisasi gedung dan bangunan dilingkungan Kantor Wilayah	Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan	Setiap usulan dari kanwil terkait revitalisasi gedung dan bangunan telah dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan	B03 : 1. Koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait kelayakan gedung dan bangunan 2. Penyusunan TOR/RAB revitalisasi gedung dan bangunan Kantor Wilayah dan Satker 3. Pengajuan surat usulan revitalisasi gedung dan bangunan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan	B03: 1. Laporan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR 2. TOR/RAB revitalisasi gedung dan bangunan Kantor Wilayah dan Satker 3. Surat usulan revitalisasi gedung dan bangunan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan	DIV ADMIN
6	Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di Wilayah	Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah	Termanfaatkannya aplikasi khusus Unit Utama di lingkungan Kanwil secara optimal (100%)	B03 : Inventarisasi dan identifikasi aplikasi khusus unit utama yang dapat digunakan di satker dan kantor wilayah sesuai bidang tugas masing-masing	B03 : Laporan inventarisasi	DIV ADMIN
				B06 : Pemanfaatan aplikasi khusus dan penyesuaian aplikasi di wilayah ke Pusdatin	B06 : Dokumen verifikasi	
				B09 : Monitoring dan Evaluasi	B09 : Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 : Laporan	B12 : Laporan pelaksanaan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
7	Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel	Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya	Glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya setiap hari	B03-B09: 1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	B03-B09: 1. Daftar akun Satuan Kerja yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan Bulanan pelaksanaan glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif	DIV ADMIN
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	
8	Optimalisasi implementasi <i>Corporate University</i> dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang hukum dan HAM	1. Meningkatnya kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i> 2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada sistem informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM)	Meningkatnya kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i> (70% dari jumlah pegawai dilingkungan Kantor wilayah)	B03: 1. Pembentukan Tim Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM 2. Pelaksanaan Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM 3. Sosialisasi Sistem Informasi Corpu	B03: 1. SK Tim Pelaksana Corpu 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi	DIV ADMIN
				B06-B09 : 1. Penyusunan SK Peserta 2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/workshop/lokakarya	B06-B09 : 1. SK Peserta 2. Laporan pelaksanaan Corpu	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: 1. Penyusunan SK Peserta 2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/work shop/lokakarya 3. Evaluasi pelaksanaan Corpu	B12: 1. SK Peserta 2. Laporan pelaksanaan Corpu 3. Laporan evaluasi pelaksanaan <i>Corpu</i>	
9	Tata Kelola digitalisasi Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah	Terlaksananya digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil	Proses digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil sebanyak 50%	B03 : 1. Inventarisasi arsip dinamis dan inaktif yang akan digitalisasi dan dihapuskan 2. Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip	B03 : 1. Laporan Inventarisasi arsip manual yang akan digitalisasi 2. Laporan hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip	DIV ADMIN
				B06-B09 : Melakukan digitalisasi arsip	B06-B09 : Laporan pelaksanaan digitalisasi arsip	
				B12 : Evaluasi arsip yang sudah didigitalisasi	B12 : Laporan hasil digitalisasi	
10	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja	Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan	1. Setiap triwulan kanwil melakukan evaluasi kinerja seluruh satker 2. Kanwil memberikan piagam penghargaan kepada satker berkinerja terbaik	B03: kanwil melakukan evaluasi capaian kinerja satker	B03 : Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja	DIV ADMIN
				B06 : kanwil melaksanakan rapat evaluasi kinerja di tingkat Satuan Kerja	B06 : Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja	
				B09 : kanwil melaksanakan rapat evaluasi kinerja di tingkat Satuan Kerja	B09 : Laporan hasil evaluasi kinerja Satuan Kerja	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10: 1.Penyusunan bahan rakor evaluasi tingkat kementerian 2. Pemberian penghargaan kepada satker berkinerja baik	B10: 1.Konsep Bahan Rakor Evaluasi Tingkat Kementerian 2. Piagam penghargaan kepada satker berkinerja baik	
				B12 : Evaluasi capaian kinerja	B12 : Dokumen hasil evaluasi capaian kinerja	
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM						
11	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	Terlaksananya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	B01: SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	B01: SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B02 Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota</p>	<p>B02 Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi: b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi</p>	
				<p>B03 Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota</p>	<p>B03 Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi: b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B04 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B04 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B05 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B05 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B06 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B07 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B07 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B08 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B08 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B09 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B09 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B10 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B10 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B11 Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B11 Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: 1) Surat Permohonan; 2) NA atau 3) Penjelasan/Keterangan 4) dokumen rapat 5) (Undangan, daftar hadir, Notula dan 6) Dokumentasi) 7) Raperda atau Raperkada yang telah mendapat 8) paraf persetujuan seluruh anggota Tim Penyusunan. b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	
				<p>B12 Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Fasilitasi Raperda yang berasal dari Pemerintah daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B12 Laporan Kegiatan Fasilitasi Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
12	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	Tersusunnya Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	B01: -	B01: -	DIV YANKUM
				B02: Pengecekan kesesuaian data Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 dari BPHN.	B02: Surat Penyampaian Hasil Monev Administrasi Semester I 2022 dari BPHN.	
				B03: 1. Pemetaan Data Hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 untuk dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara faktual; 2. Penyampaian jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantaun dan Evaluasi secara Faktual ke BPHN.	B03: 1. Rapat Penentuan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual (UANG) 2. Surat Pemberitahuan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantaun dan Evaluasi secara Faktual	
				B04: -	B04: -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05: Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap I	B05: 1. Surat Perintah Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap I 2. Matrik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap I	
				B06: -	B06: -	
				B07: Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap II	B07: 1. Surat Perintah Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap II. 2. Matrik Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap II.	
				B08: Penyusunan Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	B08: Rapat Finalisasi Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023 (UANG)	
				B09 Penyampaian Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023.	B09: Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA.2023 Catatan: Laporan sesuai TNDE	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10: -	B10: -	
				B11: -	B11: -	
				B12: -	B12: -	
13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum melalui Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	70% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	B06: 20% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	B06: Laporan Pelaksanaan Monev, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu dan tempat pelaksanaan • Pelaksana Monev • Data PBH yang dilakukan Monev • Data Penerima Bantuan Hukum yang di Monev dari aplikasi Sidbankum (nama dan nomor permohonan) • Hasil Temuan Catatan: Laporan sesuai TNDE	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09: 40% (B06:20% + B09:20%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	B09: Laporan Pelaksanaan Monev, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu dan tempat pelaksanaan • Pelaksana Monev • Data PBH yang dilakukan Monev • Data Penerima Bantuan Hukum yang di Monev dari aplikasi Sidbankum (nama dan nomor permohonan) • Hasil Temuan Catatan: Laporan sesuai TNDE	
				B12: 70% (B09:40% + B12:30%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	B12: Laporan Pelaksanaan Monev, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu dan tempat pelaksanaan • Pelaksana Monev • Data PBH yang dilakukan Monev • Data Penerima Bantuan Hukum yang di Monev dari aplikasi Sidbankum (nama dan nomor permohonan) • Hasil Temuan Catatan: Laporan sesuai TNDE	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
14	Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	80% rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	B03: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim 2. Penyusunan Proposal 3. Presentasi Proposal 4. Evaluasi atas implementasi model intervensi Tahun 2022 	B03: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK TIM 2. Proposal 3. Laporan Kegiatan Presentasi Proposal (bahan presentasi, undangan, absensi, notula rapat, dan dokumentasi) 4. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi tahun 2022 	DIV YANKUM
				B06: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Data hasil Survei online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 2. Pelaksanaan verifikasi lapangan 3. Pengolahan data hasil verifikasi lapangan 4. Penyampaian laporan hasil verifikasi lapangan ke UPT (termasuk model intervensi) 5. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 	B06: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengolahan data hasil Survei online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 2. Laporan verifikasi data lapangan 3. Laporan Pengolahan data hasil verifikasi lapangan 4. Surat penyampaian dan Bukti capture penyampaian laporan hasil verifikasi lapangan ke UPT (termasuk model intervensi) 5. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Data hasil Survei online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April – Juni 2023 (Triwulan II) 2. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan April – Juni 2023 (Triwulan II) 	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengolahan Data hasil Survei online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April – Juni 2023 (Triwulan II) 2. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi periode April – Juni 2023 (Triwulan II) 	
				<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan data hasil Survei online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli – September 2023 (Triwulan III) 2. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Juli – September 2023 (Triwulan III) 3. Pengolahan data hasil Survei online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober-November 2023 (Triwulan IV) 	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengolahan data hasil Survei online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli – September 2023 (Triwulan III) 2. Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Juli – September 2023 (Triwulan III) 3. Laporan Pengolahan data hasil Survei online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober-Desember 2023 (Triwulan IV) 	
15	Memastikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui	1. Tersosialisasikan tugas, fungsi, dan aplikasi PPNS kepada seluruh PPNS di	B01: Koordinasi terkait sosialisasi tugas fungsi dan aplikasi PPNS di wilayah	B01: Laporan kegiatan koordinasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		<p>aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham</p>	<p>wilayah; 2. Terintegrasinya data seluruh PPNS di Aplikasi PPNS; 3. Terlaksananya pelaporan seluruh kegiatan PPNS pada aplikasi (per triwulan / semester).</p>	<p>B02: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B02: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 80% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	
				<p>B03: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B03: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 90% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	
				<p>B04: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B04: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 95% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B05: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B05: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	
				<p>B06: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B06: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	
				<p>B07: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B07: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B08: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B08: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	
				<p>B09: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B09: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	
				<p>B10: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B10: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B11: Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B11: Laporan pemutakhiran data pelantikan PPNS yang disampaikan sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen pelantikan di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS (Lampiran: dokumentasi capture aplikasi)</p>	
				<p>B12: Evaluasi pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023 melalui aplikasi PPNS</p>	<p>B12: Laporan Evaluasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)</p>	
		<p>2. Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)</p>	<p>Terlaksananya kegiatan penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah: a. Kewarganegaraan; b. Pewarganegaraan; c. Apostille; dan d. Perseroan Perorangan untuk 10% dari jumlah UKM di wilayah masing- masing.</p>	<p>B01-B02: 1. Persiapan dan koordinasi awal penyebaran informasi layanan AHU di Wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan);</p>	<p>B01-B02: Laporan persiapan dan koordinasi awal (Lampiran: surat undangan, daftar hadir/surat tugas, notula, dokumentasi foto) dan Matriks data pengguna layanan (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan) per Januari 2022</p>	<p>DIV YANKUM</p>

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03-B05: Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	B03-B05: Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Kewarganegaraan dan pewarganegaraan (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)	
	B06-B08: Penyebaran informasi layanan Apostille	B06-B08: Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Apostille (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)				
	B09-B11: Penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan	B09-B11: Laporan pelaksanaan penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi dan materi/bahan paparan)				
	B12: Evaluasi pelaksanaan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan)	B12: 1. Laporan Evaluasi (Lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi); 2. Matriks data pengguna layanan (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan) per Desember 2023				
16	Penerapan PMPJ dan Pengawasan Audit Kepatuhan Terhadap Notaris	Pengisian Form CDD oleh Pengguna Jasa, Penilaian Mitigasi	Penerapan PMPJ dan Laporan Transaksi Keuangan	B01: Pembentukan SK Tim	B01: SK TIM	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		Risiko oleh Notaris dan Penilaian Notaris berisiko oleh LPP	Mencurigakan melalui Aplikasi goAML oleh Notaris	<p>B02: Penyusunan jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)</p> <p>B03: Internalisasi SRA, Pengisian CDD Mitigasi penilaian risiko pengguna jasa oleh Notaris & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)</p>	<p>B02: Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko.</p> <p>B03: Laporan kegiatan (lampiran: surat undangan, daftar hadir peserta, notula, tabel pemetaan (presentase jumlah Notaris dengan jumlah yang sudah mengisi kuesioner PMPJ Tahun 2022), dokumentasi foto)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06-B11: Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	B06-B11: 1. Surat Pengantar Audit Kepatuhan (Lampiran IV - Panduan Teknis Audit Kepatuhan); 2. Daftar Hadir Audit Kepatuhan; 3. Notula Kegiatan Audit Kepatuhan; 4. Dokumentasi Foto Kegiatan Audit Kepatuhan; 5. Laporan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Audit Kepatuhan; 6. Capture penyampaian seluruh data dukung via Sumaker yang terlampir dalam panduan teknis hingga tembusan laporan hasil audit kepatuhan kepada Subbagian Tata Usaha Direktorat Perdata cq. Subdit Notariat.	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B12: Evaluasi atas Audit Pengawas Kepatuhan Penerapan PMPJ oleh Kanwil bersama Majelis Pengawas Notaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Wilayah wajib melaksanakan rapat internal untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dengan evaluasi sekurang- kurangnya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian dari pelaksanaan pengawasan; - Tantangan / kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta solusi yang diambil; - Rencana tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan tahun 2023. 	<p>B12: Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) tabel data pengisian kuesioner (presentase jumlah Notaris dengan jumlah yang sudah mengisi kuesioner PMPJ Tahun 2022 & Tahun 2023) dan tabel data Audit pengawas kepatuhan Tahun 2022 & Tahun 2023)</p>	
17	Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil & Pengwil.	Adanya Data Notaris yang Akurat	<p>B01: Pembentukan Tim</p> <p>B02: Pemetaan jumlah Notaris sesuai data base</p>	<p>B01: SK Tim</p> <p>B02: Data Notaris di Wilayah</p>	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B03: Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 25% dari jumlah Notaris di wilayah.</p>	<p>B03: - Hasil pengecekan data : 25% dari jumlah Notaris di wilayah. - Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia & sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya. - Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto & data Notaris)</p>	
				<p>B06: Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 50% dari jumlah Notaris di wilayah.</p>	<p>B06: - Hasil pengecekan data : 50% dari jumlah Notaris di wilayah. - Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia & sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya. - Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto & data Notaris)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B09: Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 75% dari jumlah Notaris di wilayah.</p>	<p>B09: - Hasil pengecekan data : 75% dari jumlah Notaris di wilayah. - Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia & sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya. - Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto & data Notaris)</p>	
				<p>B11: Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 100% dari jumlah Notaris di wilayah.</p>	<p>B11: - Hasil pengecekan data : 100% dari jumlah Notaris di wilayah. - Tindaklanjut hasil pengecekan, bagi Notaris yang tidak aktif diusulkan pemblokiran akunnya. Bagi Notaris yang meninggal dunia & sudah pensiun dilakukan pengecekan dan pengusulan pemegang protokolnya. Laporan (lampiran: surat koordinasi, daftar hadir, notula, dokumentasi foto & data Notaris)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12: Evaluasi Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	B12: Laporan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, data sebelum dan sesudah dilakukan pengecekan & identifikasi status Notaris)	
18	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Diperolehnya alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	B01-B02: Persiapan dan koordinasi dengan instansi pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan data	B01-B02: Laporan (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)	DIV YANKUM
B03-B04: Sosialisasi kepada partai politik tingkat provinsi terkait pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	B03-B04: Laporan (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)					
B05-B08: Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	B05-B08: Laporan pengumpulan data (Laporan kegiatan, foto)					
B09-B11: Pengkian dan pendokumentasian data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	B09-B11: Laporan pengkian dan pendokumentasian data (laporan kegiatan, foto)					
B12: Evaluasi pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik	B12: Laporan hasil evaluasi (Laporan kegiatan, foto)					

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
19	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia	Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.	Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.	B01-B03: Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU	B01-B03: Laporan koordinasi persiapan tarja (Lampiran: undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi)	DIV YANKUM
				B04-B08: Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	B04-B08: Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas di wilayah	
				B09-B11: Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	B09-B11: Data anak berkewarganegaraan ganda terbatas di wilayah	
				B12: Evaluasi pelaksanaan pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	B12: Laporan hasil Evaluasi	
20	Mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk Mobile IP Clinic	inventarisasi potensi pendaftaran merek di desa-desa	Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek	B01 : Kanwil mengikuti koordinasi konsep dan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis One Village One Brand	B01 : laporan keikutsertaan koordinasi dan sosialisasi	DIV YANKUM

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B02: Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, terkait: 1. Pemetaan atau inventarisasi potensi One Village One Brand dan IG 2. Persiapan pelaksanaan Mobile IP Clinic terkait sarana prasarana layanan HKI di wilayah	B02: laporan koordinasi potensi One Village One Brand atau laporan koordinasi rencana pelaksanaan Mobile IP Clinic	
				B03: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B03: Laporan	
				B04: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B04: Laporan	
				B05: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B05: Laporan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B06: Laporan	
				B07 : 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B07: Laporan	
				B08: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B08: Laporan	
				B09: 1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri	B09: Laporan	
				B10: Inventarisasi One Village One Brand dan IG	B10: laporan hasil inventarisasi One Village One Brand dan IG	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11: 1. Evaluasi hasil inventarisasi One Village One Brand dan IG 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Mobile IP Clinic	B11: laporan evaluasi hasil inventarisasi dan pelaksanaan Mobile IP Clinic	
				B12: -	B12: -	
21	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK	Kantor Wilayah menjalin kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan layanan KI dan peningkatan permohonan KI melalui implementasi MoU/PKS Kanwil dengan stakeholder wilayah	Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU/PKS Kantor Wilayah dengan Stakeholder wilayah	B01 : - Inventarisasi dan Evaluasi MoU yang sudah dilakukan oleh Kanwil. - Tindak lanjut dan penyusunan MoU/ PKS kanwil dengan stakeholder tahun 2023."	B01 : Laporan Evaluasi 2022	DIV YANKUM
				"B02: - Kanwil mengikuti koordinasi Mobile IP Clinic yang dilaksanakan oleh DJKI - Kanwil menyusun rencana pelaksanaan Mobile IP Clinic dengan titik berat merek (dalam rangka tahun merek). - Kanwil Koordinasi dengan MIPG untuk penyempurnaan Dokumen Deskripsi permohonan Indikasi Geografis yang sudah diajukan sebelumnya."	"B02: Laporan pelaksanaan kegiatan."	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B03: Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab/instansi terkait layanan KI melalui 2 mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Clinic (mall pelayanan publik, layanan sentra KI, dll) - bagi wilayah yang telah memiliki layanan KI/IP Clinic di MPP 2. Mobile IP Clinic - bagi wilayah yang belum memiliki layanan KI di MPP. 	<p>B03: Dokumen Laporan koordinasi</p>	
				<p>B04: Inventarisasi layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC/ 1 tahun) 	<p>B04: Dokumen Laporan implementasi</p>	
				<p>B05: Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC) 	<p>B05: Dokumen Laporan implementasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06 : Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B06: Dokumen Laporan implementasi	
				B07: Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B07: Dokumen Laporan implementasi	
				B08 : Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B08: Dokumen Laporan implementasi	
				B09: Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B09: Dokumen Laporan implementasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10: Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	B10: Dokumen Laporan implementasi	
				"B11: -"	"B11: -"	
				B12: Pelaksanaan evaluasi MIC serta rencana kerja pelaksanaan implementasi tahun 2024	B12: Dokumen Laporan dan evaluasi 2023	
22	Persiapan Pencanaan Kawasan Karya Cipta 2024 Dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku	Kantor Wilayah bersama dengan stakeholder Melaksanakan mengusulkan inventarisasi kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan pedoman yang diberikan	Kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan kriteria	B01 : -	B01 : -	DIV YANKUM
				B02: Mengikuti koordinasi persiapan Pemetaan Calon kawasan karya cipta dari DJKI	B02: Laporan mengikuti kegiatan dan dokumentasi	
				B03 : 1. Koordinasi dengan stakeholder 2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI	B03: Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC	
				B04 : -	B04 : -	
				B05 : -	B05 : -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06: 1. Koordinasi dengan stakeholder 2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI	B06: Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC	
				B07 : -	B07 : -	
				B08 : -	B08 : -	
				B09: 1. Koordinasi dengan stakeholder 2. Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI	B09: Laporan hasil koordinasi dan usulan kandidat KKC	
				B10 : -	B10 : -	
				B11: Verifikasi Data Kandidat KKC	B11: Hasil verifikasi kandidat KKC oleh DJKI dan Kanwil	
				B12: Penentuan kandidat kawasan karya cipta 2024	B12: Laporan usulan Kandidat KKC	
23	Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten	Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten	B01: Memetakan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	B01: Daftar Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	DIV YANKUM
				B02: -	B02: -	
				B03: -	B03: -	
				B04: Koordinasi dengan Direktorat Paten, DTLST dan RD	B04: Laporan hasil koordinasi dengan Direktorat Paten, DTLST dan RD	
				B05: -	B05: -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06: Pelaksanaan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	B06: Laporan kegiatan	
				B07: Evaluasi kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	B07: Laporan hasil evaluasi kegiatan	
				B08: -	B08: -	
				B09: -	B09: -	
				B10: -	B10: -	
				B11: -	B11: -	
				B12: -	B12: -	
24	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional	Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI)	Terlaksananya sertifikasi pusat belanja dan monev sertifikasi pusat belanja berbasis KI	B01: -	B01: -	DIV YANKUM
				B02: -	B02: -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B03: Pelaksanaan koordinasi dengan Direktorat Penyidikan atas rencana tindak lanjut sertifikasi pusat belanja tahun 2022 serta tahapan rencana kerja di tahun 2023 dengan ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional</p>	<p>B03: Laporan mengikuti kegiatan dan dokumentasi</p>	
				<p>B04: -</p>	<p>B04: -</p>	
				<p>B05: -</p>	<p>B05: -</p>	
				<p>B06: Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional</p>	<p>B06: Laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI</p>	
				<p>B07: - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan</p>	<p>B07: laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08: - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	B08: laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI	
				B09: - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	B09: laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI	
				B10: - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	B10: laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan 	<p>B11:</p> <p>laporan pelaksanaan survei dan/atau pelaksanaan edukasi perlindungan KI</p>	
				<p>B12:</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional dan rencana kerja KI 2024</p>	<p>B12:</p> <p>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja</p>	
25	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM	45 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	<p>B01:</p> <p>Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait</p>	<p>B01:</p> <p>Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM Daerah</p>	DIV YANKUM
				<p>B02:</p> <p>Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait</p>	<p>B02:</p> <p>Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM 2022</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03: Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	B03: Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM Daerah	
				B04: Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B04	B04: Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kab/Kota	
				B05: Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B04	B05: Daftar Pelaporan Aksi HAM Daerah	
				B06: Koordinasi dan konsultasi persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08	B06: Dokumentasi dan notula Koordinasi dan konsultasi persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08	
				B07: Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B07: Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM B04 tahun 2022	
				B08: Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B08	B08: Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kab/Kota	
				B09: Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B08	B09: Daftar Pelaporan Aksi HAM Daerah B08	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B10: Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B10: Laporan Evaluasi pelaksanaan capaian Aksi HAM B08 tahun 2022	
				B11: Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B12	B11: Surat Notifikasi pelaporan Aksi HAM B12 Daerah Provinsi, Kab/Kota	
				B12: Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B12	B12: Daftar Pelaporan Aksi HAM Daerah B12	
26	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM	25% instansi pemerintah yang mendapatkan kriteria Daerah Kab/Kota Peduli HAM	B01 : Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	B01 : Surat Notifikasi pelaksanaan Permenkumham No. 22 tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah daerah	DIV YANKUM
				B02 : Rapat persiapan penginputan laporan KKP HAM	B02 : Dokumentasi dan notulensi	
				B03: Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	B03 : Dokumen Formulir Pengisian Pelaporan KKP HAM	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B04 : Mengunggah dokumen Pelaporan KKP HAM Pemda masing-masing Wilayah ke website Aplikasi (kkpham.kemenkumam.go.id)	B04 : Berita Acara pengisian ke aplikasi (kkpham.kemenkumham.go.id)	
				B05 : Menginventarisir hasil pelaporan KKP HAM	B05 : Dokumen Rekap Pemda yang melaporkan dan tidak melaporkan KKP HAM	
				B06 : Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	B06 : Laporan hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	
				B07 : Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka evaluasi pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM	B07 : Dokumentasi dan notulensi	
				B08 : Penginputan data indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	B08 : Berita acara hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota Peduli HAM	
				B09 – B12: -	B09 – B12: -	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
27	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50% Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	B01 : Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	B01 : Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	DIV YANKUM
				B02 : Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	B02 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	
				B03: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Tahun sebelumnya	B03 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	
				B04 : Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	B04 : Laporan Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM pada Triwulan I	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B05 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	B05 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan I	
				B06 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	B06 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan I	
				B07 : Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	B07 : Laporan Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM Semester I	
				B08 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	B08 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Semester I	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B09 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I</p>	<p>B09 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Semester I</p>	
				<p>B10 : Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Januari- September 2023</p>	<p>B10 : Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Januari-September 2023</p>	
				<p>B11 : Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III</p>	<p>B11 : Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan III</p>	
				<p>B.12 : 1. Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III; 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada tahun berjalan</p>	<p>B.12 : 1. Surat Koordinasi/klarifikasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM kepada instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan III; 2. Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun berjalan</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
DIVISI PEMASYARAKATAN						
28	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Masyarakat Di Bidang Pelayanan Tahanan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan dibidang Pelayanan Tahanan	Menurunnya angka Overstaying Tahanan di Lapas dan Rutan	B.01 Membuat SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di Ypt Lapas/Rutan Wilayah	B01 SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di Ypt Lapas/Rutan Wilayah	DIV PAS
				B02 Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	B02 Laporan Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	
				B03 Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	B03 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	
				B04 Melaksanakan Dilkumjakpol terkait upaya penanganan overstaying tahanan	B04 Laporan Pelaksanaan Dilkumjakpol terkait upaya penanganan overstaying tahanan	
				B05 Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	B05 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06 Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	B06 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	
				B07 Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	B07 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	
				B08 Sosialisasi Penanganan Overstayign Tahanan	B08 Laporan Sosialisasi Penanganan Overstayign Tahanan	
				B09 Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	B09 Laporan Pelaksanaan Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	
				B10 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B11 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab		
				B12 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi			
29	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan dibidang Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	Terselenggara Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	B01 Pembentukan Tim pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	B01 SK Tim	DIV PAS		
B02 Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	B02 Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	B03 Memfasilitasi perjanjian kerjasama antara Pihak ketiga yang terakreditasi maupun terverifikasi dengan Unit Pelaksana Teknis Rutan/Lapas dalam pelaksanaan Pelayanan tahanan	B03 Perjanjian Kerjasama / MOU	B04 Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Tahanan Miskin	B04 Laporan Jumlah Tahanan miskin yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) di Rutan		B05 Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	B05 Laporan Supervisi

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B06 Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	B06 Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	
				B07 Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	B07 Laporan Tahanan yang mendapatkan Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	
				B08 Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Tahanan Miskin	B08 Laporan Jumlah Tahanan miskin yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) di Rutan	
				B09 Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	B09 Laporan Supervisi	
				B10 Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan monitoring dan evaluasi	
				B11 Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan monitoring dan evaluasi	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan monitoring dan evaluasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
30	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang pengelolaan basan baran	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar	Pengunaan SDP dalam Tatakelola administrasi basan baran yang optimal	B01 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B01 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	DIV PAS
				B02 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B02 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B03 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B03 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B04 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B04 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B05 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B05 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B06 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B06 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B07 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B07 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B08 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B09 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B09 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B10 Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B11 Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
31	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi masyarakatan	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi masyarakatan.	Terselenggaranya layanan rehabilitasi bagi tahanan, narapidana, dan klien sesuai standar rehabilitasi masyarakatan	B.01: Penyampaian SK Direktur Jenderal Masyarakatan tentang Penetapan UPT Masyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakatan Tahun 2023	B.01: Laporan penyampaian SK Direktur ke wilayah.	DIV PAS
				B.02: Koordinasi Kesiapan UPT Masyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakatan Tahun 2023	B.02: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.03: Perencanaan Pelaksanaan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan ke UPT Pemasarakatan	B.03: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Persiapan	
				B.04: Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	B.04: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring	
				B.05: Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	B.05: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring	
				B.06: Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	B.06: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Mentoring	
				B.07: Monitoring UPT Pemasarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan	B.07: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	
				B.08: Monitoring UPT Pemasarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan	B.08: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.09: Monitoring UPT Pemasarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan	B.09: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring	
				B.10: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B.01-06)	B.10: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan	
				B.11: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B.07-09)	B.11: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Juli- September 2023	
				B.12: Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B.10-12)	B.12: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Oktober-Desember 2023	
32	Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan pemsarakatan melalui pertukaran data SPPT TI	Terlaksananya SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas	Seluruh Lapas/Rutan/Bapas telah menerapkan SPPT TI	B.01: 1. Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. Penetapan UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	B.01: 1. SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. SK UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	DIV PAS
				B.02: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.02: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.03: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.03: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.04: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.04: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.05: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.05: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.06: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.06: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.07: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.07: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.08: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.08: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.09: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.09: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.10: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.10: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
				B.11: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.11: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.12: Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	B.12: Laporan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
33	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	B.01: Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan	B.01: SK Tim	DIV PAS
B.02: Perencanaan Pelaksanaan Kordinasi tentang Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan	B.02: Laporan Perencanaan Pelaksanaan Koordinasi Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan					
B.03: Asistensi Online Persiapan Rapat Koordinasi Tentang Piloting Implementasi Keadilan Restoratif	B.03: Laporan Pelaksanaan Asistensi Online Persiapan Rapat Koordinasi Tentang Piloting Implementasi Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa					
B.04: Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi tentang Peran Pemasarakatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif ke Kepolisian Kejaksaan, dan Pengadilan Setempat	B.04: Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi tentang Peran Pemasarakatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif ke Kepolisian Kejaksaan, dan Pengadilan Setempat					

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.05: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.05: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	
				B.06: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.06: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	
				B.07: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.07: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	
				B.08: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.08: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	
				B.09: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.09: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	
				B.10: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	B.10: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.11: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	B.11: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	
				B.12: Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	B.12: Laporan Capaian Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	
34	Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana	1. Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan Kemandirian sbb: a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun	B.01: Koordinasi dengan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan. Koordinasi dengan pihak ketiga yang diproyeksikan menjadi mitra lapas.	B.01: Laporan koordinasi dengan Kanwil terkait pemetaan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan.	DIV PAS

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			<p>2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra.</p> <p>b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.</p>	<p>B.02: Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas terkait pembinaan kemandirian sbb:</p> <p>a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra.</p> <p>b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.</p>	<p>B.02: Laporan Rekapitulasi Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas</p>	
				<p>B.03: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>B.03: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	
				<p>B.04: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra</p>	<p>B.04: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	
				<p>B.05: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	<p>B.05: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.06: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.06: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	
				B.07: Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.07: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	
				B.08: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.08: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B.09: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.09: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B.10: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.10: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	
				B.11: Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	B.11: Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	
				B.12: Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	B.12: Laporan evaluasi pelaksanaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
		2. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian.	Narapidana yang dinilai dan memperoleh nilai sangat baik dalam pembinaan kepribadian dengan instrumen SPPN sebanyak 70%.	<p>B.01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian pembinaan narapidana. 2. Tindak lanjut Surat Edaran tentang Target Kinerja Pelayanan pembinaan narapidana tahun 2023 	<p>B.01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan penilaian pembinaan narapidana. 2. Laporan hasil penilaian pada bulan Desember. 3. Laporan hasil tindak lanjut SE tentang Target Kinerja Pelayanan Pembinaan Narapidana tahun 2023. 	DIV PAS
<p>B.02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023. 	<p>B.02:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Laporan hasil Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023. 					
<p>B.03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.55% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara. 2.55% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.55% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.55% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari. 	<p>B.03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Februari. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian) 					

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B.04 :</p> <p>1.60% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.60% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.60% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.60% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret.</p>	<p>B.04:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Maret. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B.05:</p> <p>1.65% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.65% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.65% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.65% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan April.</p>	<p>B.05:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan April.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan April. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B.06:</p> <p>1.70% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.70% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.70% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.70% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p>	<p>B.06:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Mei. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B.07:</p> <p>1.75% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.75% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.75% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.75% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p>	<p>B.07:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juni.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juni. (65 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B.08:</p> <p>1.80% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.80% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.80% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.80% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p>	<p>B.08:</p> <p>1.Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Juli.</p> <p>2.Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Juli. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B.09:</p> <p>1.85% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.85% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.85% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.85% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p>	<p>B.09:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Agustus.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Agustus. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B.10:</p> <p>1.90% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.90% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.90% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.90% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p>	<p>B.10:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan September.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan September. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	
				<p>B.11:</p> <p>1.95% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, kebangsaan dan bernegara.</p> <p>2.95% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual.</p> <p>3.95% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama.</p> <p>4.95% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani.</p> <p>5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober.</p>	<p>B.11:</p> <p>1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan Oktober.</p> <p>2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan Oktober. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B.12: 1.100% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.100% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.100% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.100% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan November.	B.12: 1. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana pada bulan November. 2. Laporan hasil penilaian pembinaan kepribadian pada bulan November. (70 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)	
35	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini	Melakukan langkah-langkah deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA	B01 1. Sosialisasi dan internalisasi target kinerja pusat ke seluruh UPT 2. Pembentukan UIP pada setiap UPT 3. Jumlah Petugas yang belum dan yang sudah mendapatkan pelatihan di UPT 4. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib 5. Sosialisasi konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	B01 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi target kinerja 2. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 3. Rekap dari kanwil nama, nip, jabatan, nomor HP petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan dari UPT 4. laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini 5. Laporan pelaksanaan sosialisasi konsolidasi	DIV PAS

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B02 1.Pembentukan UIP pada setiap UPT 2.Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah 3.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	B02 1. SK UIP dari Unit Pelaksana Teknis di Indonesia 2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap UPT 3. Laporan hasil konsolidasi	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B03</p> <p>1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>2.Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Barat</p> <p>3. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>B03</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP</p> <p>3. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>4.Laporan hasil konsolidasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B04</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Tengah 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B04</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP 2. Laporan kegiatan Intelijen 3. Laporan hasil konsolidasi 	
				<p>B05</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Timur 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B05</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tusi anggota UIP 2. Laporan kegiatan Intelijen 3. Laporan hasil konsolidasi 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B06</p> <p>1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</p> <p>2.Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen</p> <p>3.Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib</p> <p>4.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>B06</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencan a aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan kegiatan intelijen</p> <p>3.Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangtib berdasarkan hasil identifikasi instrumen deteksi dini</p> <p>4.Laporan hasil konsolidasi</p>	
				<p>B07</p> <p>1.Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel</p> <p>2.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>B07</p> <p>1.Laporan kegiatan Intelijen</p> <p>2.Laporan hasil konsolidasi</p>	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				<p>B08</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B08</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan kegiatan Intelijen 2.Laporan hasil konsolidasi 	
				<p>B09</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B09</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan 2. Laporan kegiatan intelijen 3. Laporan hasil konsolidasi 	
				<p>B10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arahkebijakan Intelijen Pemasarakatan 	<p>B10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan kegiatan Intelijen 2.Laporan hasil konsolidasi 	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B11 1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	B11 1. Laporan kegiatan Intelijen 2. Laporan hasil konsolidasi	
				B12 1. Monev Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	B12 1. Laporan Pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini 2. Laporan kegiatan intelijen 3. Laporan hasil konsolidasi	
36	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	B01 Melakukan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024	B01 Laporan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan PEMILU 2024	
				B02 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B02 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B03 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B03 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B04 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B04 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B05 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B05 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B06 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B06 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B07 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B07 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B08 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B08 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B09 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B09 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B10 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B10 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B11 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B11 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
				B12 Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	B12 Laporan Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 pada Lapas/Rutan	
DIVISI IMIGRASI						
37	Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman	Diimplementasikannya layanan Paspor Online terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)	Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan Paspor Online secara berkelompok dalam melakukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor	B03 1. Melaksanakan Sosialisasi dan uji coba Paspor Online kepada masyarakat/lembaga/instansi terkait oleh setiap satuan kerja 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan melampirkan dokumentasi	B03 1. Kompilasi laporan uji coba dan data pelaksanaan sosialisasi paspor online oleh Divisi Keimigrasian 2. Laporan sosialisasi Paspor Online (per Satuan Kerja) beserta Dokumentasi 3. Uji coba kesisteman	DIV IMI

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
			Imigrasi, Mal Pelayanan Publik) Catatan: Data secara kelompok harus dibatasi sebagaimana Eazy paspor dan paspor simpati	<p>B06 1. Penerapan Paspor Online 2. Evaluasi Penerapan Paspor Online oleh Divisi Keimigrasian kepada Satuan Kerja</p> <p>B09 1. Monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis 2. Pengumpulan data dan evaluasi</p> <p>B12 Penyampaian identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Paspor Online</p>	<p>B06 1. Laporan Implementasi Paspor Online beserta dokumentasi (per satuan kerja) 2. Laporan Evaluasi Implementasi Paspor Online beserta dokumentasi (oleh Divisi Keimigrasian)</p> <p>B09 Laporan monitoring dan evaluasi Divisi Keimigrasian kepada satuan kerja terkait implementasi Paspor Online beserta dokumentasinya</p> <p>B12 Dokumen Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan setiap satuan kerja yang direkapitulasi oleh Divisi Keimigrasian</p>	
38	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di Wilayah Indonesia	Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	Adanya informasi dan data tentang Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)	<p>B03 1. Pembentukan tim klasifikasi SDM 2. Pembentukan Tim pelatih teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>) 3. Pelatihan Teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)</p> <p>B06 pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)</p> <p>B09 Monitoring Pelaksanaan pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)</p>	<p>B03 1. SK Tim 2. Data SDM yang terklasifikasi untuk dilatih 3. Laporan pelaksanaan pelatihan teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)</p> <p>B06 Dokumen Hasil Pendataan</p> <p>B09 Dokumen hasil monitoring</p>	DIV IMI

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B12 Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Final Reject</i>	B12 Laporan Evaluasi dan Dokumentasi	
39	Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing	Terselenggaranya data penjamin virtual bagi orang asing dan kegiatannya yang memerlukan keberadaan orang asing	B03: 1. Pembentukan tim pendataan penjamin orang asing 2. Rapat dengan K/L terkait yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan perusahaan / organisasi B06: 1. Pelaksanaan pendataan penjamin orang asing 2. pengecekan lapangan keberadaan penjamin orang asing di daerah B09: Monitoring konsistensi hubungan penjamin dengan orang asing yang dijamin B12: Monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran aturan keimigrasian	B03: 1. Sk Tim 2. Laporan kegiatan hasil rapat pembahasan B06: 1. Hasil pendataan penjamin orang asing 2. Laporan hasil pengecekan lapangan keberadaan penjamin orang asing di daerah B09: Laporan hasil monitoring B12: Rekapitulasi laporan hasil monitoring, evaluasi dan penindakan	DIV IMI


 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
 YASONNA H. LAOLY